

# STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA HALAL BERBASIS BUMDESA DI JAWA TIMUR; PELUANG DAN TANTANGAN

**Dwi Ariady Kusuma**

Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

Email: [dwiarikusuma@gmail.com](mailto:dwiarikusuma@gmail.com)

**Ridan Muhtadi**

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Email: [ridan\\_muhtadi@iaimu.ac.id](mailto:ridan_muhtadi@iaimu.ac.id)

**Fitriyana Agustin**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura

Email: [fitriyana\\_agustin270800@yahoo.com](mailto:fitriyana_agustin270800@yahoo.com)

## ***Abstract***

*East Java Province is an area that has diversity and uniqueness of regional culture, one of which is found in rural areas which still has the originality and local wisdom of the culture typical of the region. The tourism sector is a mainstay and a source of foreign exchange for the country. The existence of Halal Tourism in Indonesia which can support regional economic development makes East Java a great opportunity to realize a Halal Tourism Village. East Java has 573 Tourism Villages spread across 38 regencies in 2021. However, this opportunity is not matched by optimal management. The presence of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) is a solution in developing tourism activities in villages that will drive the community's economy. The purpose of this research is to find out the various kinds of opportunities that exist and the challenges faced by East Java Province in developing Halal Tourism Villages through BUMDesa which is used as a development innovation concept towards better governance. The research method uses descriptive qualitative with primary data from interviews, questionnaires and other sources as a complement. The strategy outlined through the SWOT Matrix approach follows the Internal Factor Analysis (IFAS) and External Factor Analysis (EFAS) indicators. Based on the results of this study, it shows that there is a conceptual framework for Halal Tourism Village in several sectors managed by BUMDesa. Based on the results of the SWOT analysis, it shows several appropriate strategies in developing Halal Tourism Villages such as encouraging domestic and foreign investment in its development, developing a Multi-Platform information center for East Java halal tourism village based on IoT, Establishing an East Java halal tourism management authority and so on. Therefore. The existence of a Halal Tourism Village in East Java has a positive impact on the community.*

**Keywords:** *Halal Tourism Village, BUMDesa, SWOT, and East Java*

### Abstrak

Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang mempunyai keberagaman dan keunikan budaya daerah, salah satunya terdapat pada daerah perdesaan yang masih memiliki originalitas dan kearifan lokal budaya khas daerah. Sektor pariwisata menjadi andalan dan sumber devisa bagi negara. Adanya Pariwisata Halal di Indonesia yang dapat menopang perkembangan ekonomi wilayah menjadikan peluang besar untuk Jawa Timur mewujudkan Desa Wisata Halal. Jawa Timur memiliki Desa Wisata berjumlah 573 yang tersebar di 38 Kabupaten pada tahun 2021. Akan tetapi peluang ini tidak diimbangi dengan pengelolaan yang maksimal. Hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menjadi solusi dalam mengembangkan aktifitas pariwisata di desa yang akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai macam peluang yang ada dan tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan Desa Wisata Halal melalui BUMDesa yang dijadikan konsep inovasi pengembangan menuju tata kelola yang lebih baik. Adapun metode penelitian ini menggunakan Kualitatif Deskriptif dengan data primer dari hasil Wawancara, Kuisisioner dan sumber lain sebagai pelengkapannya. Strategi yang dituangkan melalui pendekatan SWOT Matrix mengikuti indikator *Internal Factor Analysis (IFAS)* *External Factor Analysis (EFAS)*. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kerangka konseptual Desa Wisata Halal dalam beberapa sektor yang dikelola oleh BUMDesa. Berdasarkan hasil analisis SWOT menunjukkan beberapa strategi tepat dalam pengembangan Desa Wisata Halal seperti mendorong investasi domestik dan asing dalam pengembangannya, pengembangan *Multi-Platform* pusat informasi desa wisata halal Jatim berdasarkan IoT, Pembentukan otoritas pengelolaan desa wisata halal Jawa Timur dan sebagainya. Dengan demikian. Adanya Desa Wisata Halal di Jawa Timur memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

**Kata kunci :** Desa Wisata Halal, BUMDesa, SWOT, dan Jawa Timur

### Pendahuluan

Pariwisata menjadi sektor andalan dan sumber devisa bagi negara-negara dunia. Bagi negara dengan potensi wisata seperti Indonesia, besarnya peningkatan tersebut tentunya menjadi berkah tersendiri. Bagi Indonesia, pariwisata adalah penyumbang PDB, devisa, dan lapangan kerja yang paling sederhana dan termurah<sup>1</sup>. Pertumbuhan pariwisata tidak terlepas dari keseriusan pemerintah dalam menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan,

---

<sup>1</sup> Muchamad Zaenuri, *Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah Konsep Dan Aplikasi* (Yogyakarta: e-Gov Publishing, 2012).

disamping didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, keragaman budaya dan adat istiadat, serta peninggalan sejarah<sup>2</sup>. Industri perjalanan mendapat perhatian yang tidak biasa dari otoritas publik belakangan ini. Hal ini nampak dari keseriusan pemerintah menetapkan pariwisata sebagai *core industry* yang didukung oleh sektor pembangunan lain. Sebagai sumber pendapatan devisa negeri atau wilayah, pariwisata merupakan bidang yang vital dalam perekonomian, pengembangan *socio-cultural*, dan memasarkkan citra positif suatu daerah<sup>3</sup>. Upaya yang dicoba pemerintah untuk menarik atensi turis baik dalam negeri ataupun mancanegara disebabkan pariwisata mampu menghidupkan bidang makanan dan minuman, transportasi, perhotelan, industri kreatif, dan lain-lain. Dalam bidang pariwisata, koordinasi antar *stakeholder* atau antar sektor menjadi penting sekali karena pariwisata merupakan sektor yang melibatkan sektor-sektor lainnya<sup>4</sup>.

Sektor pariwisata selain memiliki kontribusi langsung terhadap perekonomian, juga memiliki kontribusi secara tidak langsung terhadap pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur, pembelian barang dan jasa dalam negeri, serta input dan arus investasi<sup>5</sup>. *The tourism sector and tourism travel are the fastest growing sectors in the world* karena memiliki kemudahan peluang bekerja paruh waktu dan musiman, serta persyaratan yang mudah, baik bagi pekerja terampil maupun tidak terampil<sup>6</sup>. Pariwisata memiliki *backward linkage* dengan pertanian, perikanan, kontruksi, serta telekomunikasi<sup>7</sup>.

Daya tarik Jawa timur adalah keragaman budaya, wisata sejarah, wisata alam, dan wisata buatan yang mampu menarik turis asing berkunjung ke Jawa Timur. Tak khayal, jika sektor pariwisata Jawa Timur yang merupakan sektor unggulan destinasi pariwisata halal di Indonesia mampu menjadi penopang perkembangan ekonomi wilayah. Menurut Umiyati & Tamrin (2020), yang

---

<sup>2</sup> Norliza Aminudin and Salamiah A. Jamal, "Types of Tourism: The Travelogue of the Greatest Traveller," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 2 (January 1, 2019): 497–506, <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0089>.

<sup>3</sup> Mark Anthony Camilleri, *Travel Marketing, Tourism Economics and the Airline Product: An Introduction to Theory and Practice*, Tourism, Hospitality & Event Management (Cham: Springer, 2018), <https://doi.org/10.1007/978-3-319-49849-2>.

<sup>4</sup> Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata* (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan STiPrAm Yogyakarta, 2016).

<sup>5</sup> Camilleri, *Travel Marketing, Tourism Economics and the Airline Product*.

<sup>6</sup> Maximilliano E. Korstanje, Razaq Raj, and Kevin Griffin, eds., *Risk and Safety Challenges for Religious Tourism and Events*, CABI Religious Tourism and Pilgrimage Series (Wallingford, Oxfordshire Boston, MA: CABI, 2018).

<sup>7</sup> Aminudin and A. Jamal, "Types of Tourism."

menjadi penyebab Jawa Timur menjadi kawasan strategis dalam pengembangan pariwisata nasional adalah Jawa Timur berada pada jalur perjalanan pariwisata nasional. Bahkan, Bromo Tengger Semeru yang berada di provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai 10 destinasi prioritas dalam pengembangan pariwisata unggulan nasional oleh kementerian pariwisata.

Seiring dengan perkembangan industri pariwisata, saat ini muncul istilah pariwisata halal atau syariah. Pariwisata halal menjadi tren baru dunia pariwisata dan mempunyai prospek yang besar, khususnya di Indonesia yang mempunyai keragaman seni, budaya, warisan, dan tradisi<sup>8</sup>. Sebagai Negara yang berpenduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi destinasi utama pariwisata syariah dunia. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia mengadakan *Grand Launching* Pariwisata Syariah pada tahun 2013<sup>9</sup>. Komitmen pemerintah dalam mengembangkan kualitas kawasan wisata halal di Indonesia dilakukan dengan mengkaji aset wisata di daerah-daerah yang dinilai potensial. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya 10 destinasi prioritas yang menjadi target program pengembangan pemerintah melalui bimbingan teknis dan lokakarya destinasi wisata halal. Dilansir dari Laporan Kementerian Pariwisata Tahun 2018, 10 destinasi prioritas tersebut terdapat di 10 provinsi yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan<sup>10</sup>. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur sendiri masih mempunyai satu destinasi wisata halal yang terletak di Kabupaten Banyuwangi<sup>11</sup>. Padahal terdapat

---

<sup>8</sup> M. Zaky Mubarak Lubis, "PROSPEK DESTINASI WISATA HALAL BERBASIS OVOP (ONE VILLAGE ONE PRODUCT)," *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 3, no. 1 (June 1, 2018): 31–47, <https://doi.org/10.15548/maqdis.v3i1.153>.

<sup>9</sup> Fahadil Amin Al Hasan, "PENYELENGGARAAN PARAWISATA HALAL DI INDONESIA (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) | Al Hasan | Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum," June 30, 2017, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i1.699>.

<sup>10</sup> Tanti Handriana, Praptini Yulianti, and Masmira Kurniawati, "Exploration of Pilgrimage Tourism in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 3 (May 20, 2020): 783–95, <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0188>.

<sup>11</sup> Dini Nafisatul Mutmainah, Muksin Muksin, and Sri Sundari, "Analysis of the Sustainability of the Economic Dimension to the Development of Halal Tourism in Banyuwangi Regency," *Journal of Agri Socio Economics and Business* 2, no. 1 (June 24, 2020): 15–22, <https://doi.org/10.31186/jaseb.2.1.15-22>.

kabupaten dan kota lainnya yang memiliki potensi menjadi destinasi wisata halal.

Jawa Timur mulai serius dan fokus memajukan pariwisata halal. Faktor – faktor pendukung kemampuan Jawa Timur dalam pengembangan pariwisata halal, yaitu; 1) populasi umat muslim yang dominan, sebagian besar penduduk Jawa Timur beragama Islam.; 2) *Cultural diversity*, Budaya-budaya di Jawa Timur memiliki banyak ragam budaya, Jawa Timur terkenal kental dengan kebudayaan muslimnya karena banyaknya jumlah pondok pesantren. Eksistensi Wali Songo di Jawa Timur merupakan bukti otentik sejarah pertumbuhan Islam nusantara terpusat di provinsi Jawa Timur; 3) Banyaknya destinasi wisata religi di Jawa Timur, ada masjid - masjid dan tempat ziarah atau *pasarean* tokoh-tokoh penyebar agama islam di Jawa Timur. Destinasi wisata alam di Provinsi Jawa Timur juga tak kalah memukau; serta 4) Akomodasi dan amenities, seperti penginapan atau hotel, atraksi, kerajinan, restoran yang memiliki sertifikat halal, serta lembaga keuangan syariah dan rumah sakit Islam yang memadai <sup>12</sup>.

Jawa Timur adalah provinsi yang memiliki keragaman dan keunikan budaya, salah satunya adalah terdapatnya kawasan desa yang memiliki keunikan dan keaslian serta nilai kearifan lokal <sup>13</sup>. Hal ini dapat menjadi dasar pembangunan desa melalui sektor wisata. Masyarakat desa yang otentik dan kebudayaan yang khas mendorong untuk menjadikannya sebagai daerah tujuan wisata dengan mengembangkan potensi lokal yang ada tanpa merubah tatanan sosial masyarakat. Jawa timur memiliki desa wisata yang tersebar di 38 kabupaten/kota sejumlah 573 desa wisata di tahun 2021 yang mengalami kenaikan dari tahun 2020 sejumlah 497 desa wisata.

Desa wisata merupakan yang menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur tradisional dan struktur tata ruang desa yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung. Keaslian suatu perdesaan akan memperkuat identitas di antaranya meliputi ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, pariwisata sejarah dan budaya,

---

<sup>12</sup> Sri Umiyati and Husni Tamrin, *PENGEMBANGAN WISATA HALAL, TANGGUNG JAWAB SLAPA? Studi Kasus Kolaborasi Stakeholder Halal Tourism di Kota Malang* (Jakarta: PT. AKSES PRIMA CENDEKIA, 2020).

<sup>13</sup> Mutmainah, Muksin, and Sundari, "Analysis of the Sustainability of the Economic Dimension to the Development of Halal Tourism in Banyuwangi Regency."

serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Permodelan desa wisata harus dikembangkan secara kreatif agar dapat membangun identitas atau ciri khas daerah pedesaan tersebut. Selain itu juga Desa Wisata dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk integrasi antara akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku<sup>14</sup>. Menurut Aeni et al., (2021) Program pengembangan desa wisata belum dilakukan secara berkelanjutan sehingga program yang dilakukan hanya menekankan pada luaran tercapainya program. Berkenaan dengan situasi desa wisata maka perlu dilakukan manajemen desa wisata yang pengelolaan tersebut atas peran serta badan usaha milik desa (BUMDesa) seperti halnya di desa ponggok kabupaten klaten Jawa Tengah<sup>15</sup>.

Namun dalam proses pembangunan industri pariwisata di desa, terdapat hambatan dan tantangan. Masyarakat desa memiliki stigma tentang dunia pariwisata yang dinilai dapat mempengaruhi efek sosial dan budaya lokal masyarakat. Pariwisata sering kali dikenal dengan citra (*image*) buruknya oleh masyarakat desa, melihatnya hanya dari sudut pandang dampak negatif pariwisata, tidak menggunakan prespektif yang holistik. Sehingga harapan untuk menghadirkan industri pariwisata di desa sebagai sebuah inovasi baru sangat kecil. Hal ini akan berdampak pada ketidak mampuan masyarakat melihat kekuatan dan potensi-potensi wisata yang dimiliki oleh masyarakat desa.

Salah satu cara yang dapat mengintegrasikan seluruh potensi yang ada, yakni menjadikan desa-desa di Jawa Timur sebagai *desa wisata halal*, yang setiap pengembangannya tidak merusak nilai-nilai yang dipercayai oleh masyarakat dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan atau rusak, serta dapat memaksimalkan keuntungan ekonomi untuk masyarakat lokal<sup>16</sup>. Karena pariwisata halal membawa dampak positif bagi pengembangan nilai-nilai

---

<sup>14</sup> Nuringsih Nuringsih et al., "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekonomi Rumah Tangga di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan.," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 2 (October 22, 2019): 223–39, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5721>.

<sup>15</sup> Dwi Hastutik, Dwiningtyas Padmaningrum, and Agung Wibowo, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten," *AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension* 45, no. 1 (May 1, 2021): 46–38, <https://doi.org/10.20961/agritexts.v45i1.51539>.

<sup>16</sup> Hendri Hermawan Adinugraha et al., "Community-Based Halal Tourism Village: Insight from Setanggor Village," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (July 1, 2020): 129–54, <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.1.6819>.

agama Islam, juga kepatuhan umat Muslim terhadap agamanya<sup>17</sup>. Hasil serupa juga dikemukakan Adinugraha (2018); Anwar et al., (2020); Yanma & Zaenuri, (2021) bahwa pariwisata halal menjadi potensi terkuat karena mencerminkan kearifan lokal dan budaya masyarakat di desa yang mengandung nilai utama yaitu keimanan kepada Allah. Upaya ini dilakukan agar pembangunan desa dalam sektor pariwisata dapat diterima baik oleh masyarakat lokal<sup>18</sup>. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk memahami lebih jauh bagaimana konsep desa wisata halal menjadi sebuah inovasi baru dalam mengembangkan aktifitas pariwisata di desa berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) pada provinsi Jawa Timur.

## **Metodologi**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pakar (akademisi) dan praktisi yang berjumlah 9 (sembilan) orang diantaranya Dinas Pengembangan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas pariwisata, Dinas Koperasi UKM, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, East Java Eco-Tourism Forum, Akademi Desa Wisata (Klinik BUMDesa), Alvira Research Center, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kuisisioner yang disebarkan kepada responden yang ada di dalamnya, dan studi literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata halal berbasis BUMDesa di Jawa Timur.

Beberapa sub-elemen strategi pengembangan desa wisata halal di Jawa Timur diperoleh dari studi pustaka dan diskusi. Strategi- strategi tersebut akan

---

<sup>17</sup> Mohamed Battour, Moustafa Battor, and Muhammad Awais Bhatti, "Islamic Attributes of Destination: Construct Development and Measurement Validation, and Their Impact on Tourist Satisfaction: Islamic Tourism," *International Journal of Tourism Research* 16, no. 6 (November 2014): 556–64, <https://doi.org/10.1002/jtr.1947>.

<sup>18</sup> Andi Zulfikar Darussalam et al., "Pengembangan Manajemen Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Sipakatau', Sipakainge', Sipakalebbi?," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 2, 2021): 96–105, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1831>; Yulfan Arif Nurohman and Rina Sari Qurniawati, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Menggoro Sebagai Wisata Halal," *Among Makarti* 14, no. 1 (July 13, 2021), <https://doi.org/10.52353/ama.v14i1.200>; Hafielda Rasyifa et al., "Strategic Development of Halal Tourism Village Kampung Batik Cibuluh Bogor (KBCB) as A Socio-Cultural Destination in Indonesia," *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer* 22, no. 2 (November 14, 2021): 1–15, <https://doi.org/10.37231/jimk.2021.22.2.572>; Achmad Qori' Wijdan, "Model Pengembangan Desa Wisata Halal di Kabupaten Sumenep ditinjau Dari Peraturan Bupati NO. 15 TAHUN 2018 (Studi di Desa Semaan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Madura)," *SHIBGHAAH: Journal of Muslim Societies* 3, no. 2 (December 21, 2021): 139–47.

dituangkan dalam bentuk kuisisioner dengan menggunakan pendekatan *Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) Matrix* mengikuti indikator *Internal Factor Analysis (IFAS) External Factor Analysis (EFAS)*.

### Kerangka Konseptual Desa Wisata Halal Oleh BUMDesa

Dalam konteks desa wisata, desa wisata didasarkan pada potensi daerah pedesaan dengan keunikan dan pesona pedesaan. dapat dikatakan sebagai aset pariwisata, yang dapat dimajukan dan dikembangkan sebagai produk wisata yang menarik wisatawan ke desa tersebut. Pada dasarnya jenis-jenis desa wisata dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berikut sesuai dengan karakteristik sumber daya dan keunikannya sebagai berikut:



**Gambar:** Karakteristik Desa Wisata

1. Desa wisata yang memiliki keunikan sumber daya budaya lokal (tradisi kehidupan masyarakat, nilai-nilai budaya, dan lain-lain) yang dianggap sebagai daya tarik wisata utama, yaitu keragaman adat istiadat yang melekat sebagai bentuk budaya masyarakat pedesaan dalam kaitannya



dengan kehidupan baik kegiatan mata pencaharian penduduk, agama dan bentuk kegiatan lainnya

2. Desa wisata berdasarkan keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama (pegunungan, agro/perkebunan dan pertanian, pantai, dan lain-lain). Yakni pedesaan dengan letak yang unik di daerah pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam unik lainnya, sehingga desa memiliki potensi pemandangan dan bentang alam yang indah untuk menarik wisatawan.
3. Menjadikan desa wisata dengan keunikan budaya dan sumber daya alam sebagai daya tarik wisata utama. Dengan kata lain, kawasan pedesaan dengan daya tarik tersendiri, dengan kombinasi yang kuat antara sumber daya wisata budaya yang unik (adat istiadat, tradisi dan gaya hidup masyarakat) dan sumber daya wisata alam (keindahan lanskap/pemandangan).
4. Desa wisata dengan kekhasan kegiatan ekonomi kreatif (produksi kerajinan, dan lain-lain) sebagai tempat wisata utama, yaitu karena orisinalitas kegiatan ekonomi kreatif, yang tumbuh dan berkembang dalam kegiatan ekonomi berbasis masyarakat lokal di berupa kerajinan tangan dan kegiatan seni yang khas. Ini merupakan tempat pedesaan dengan keunikan dan pesona sebagai tujuan wisata.

Desa wisata syariah atau desa wisata halal adalah suatu pemikiran atau gagasan yang memadukan wisata syariah dengan kearifan lokal, karakteristik sumber daya dan keunikan desa tertentu. Konsep yang menggabungkan ide ini dapat diilustrasikan pada gambar integrasi Desa Wisata dan Wisata Syariah/Halal berikut.



**Gambar:** Integrasi Desa Wisata dengan Wisata Halal

Dalam proses pengelolaan desa wisata halal, masyarakat desa memiliki peranan yang sangat signifikan. Pada kajian Desa Wisata Halal ini memunculkan pandangan baru yang erat kaitannya dengan hubungan manusia dan masyarakat, manusia dan alam serta manusia dan tuhan. Adapun, alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Pariwisata bukanlah kegiatan yang ada dalam ruang hampa, melainkan kegiatan yang langsung berhubungan dengan kehidupan dan kehidupan sehari-hari.
2. Pariwisata sangat dinamis dan kreatif.
3. Pariwisata tidak eksklusif. Ini berarti bahwa pariwisata tidak hanya terkait dengan negara tertentu.
4. Pariwisata tidak eksklusif. Dengan kata lain, pariwisata dikaitkan tidak hanya dengan negara tertentu.

Berdasarkan paradigma pengembangan pariwisata baru tersebut, urgensi dalam hal sumber daya manusia sebagai turis atau tuan rumah sangat penting untuk mendukung keberhasilan pengoperasian objek wisata (dalam hal ini desa wisata halal). Peran pemerintah dalam pelaksanaan Desa Wisata Halal bersama masyarakat pedesaan sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan tugas pokok pemerintah kota pedesaan: menciptakan kehidupan yang demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang berkualitas sehingga warga negara dapat hidup sejahtera, damai, aman dan berkeadilan. Oleh karena itu, idealnya

setiap organisasi negara/pedesaan dapat mengeluarkan seluruh potensi rakyatnya. Menurut PBB, tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan diri merupakan modal utama yang memungkinkan masyarakat menjadi mandiri. Dari sudut pandang ini, tujuan pemerintahan desa untuk memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dicapai melalui pelatihan di berbagai bidang, dan pelatihan diharapkan dapat membantu masyarakat lokal menjadi mandiri.

Badan hukum tunggal yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, yaitu BUMDesa, dengan penyertaan secara langsung yang timbul dari kekayaan perseorangan Desa, untuk mengelola barang milik, jasa pelayanan, dan kegiatan lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sesuai dengan pasal 6 pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan BUMDesa merupakan upaya menghimpun seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang diatur oleh desa dan/atau kemitraan antardesa. . Pasal 72(1)a Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan awal desa berasal dari tanah BUMDesa dan Bengkok. Kebijakan pengelolaan Badan Usaha Desa (BUMDesa) pada akhirnya bertujuan untuk berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. BUMDesa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan manfaat aset, mengaktifkan inisiatif masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan kemitraan usaha antara desa dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan kekhususan desa. dibentuk dengan pendapatan. Pembentukan BUMDesa tentunya harus didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan permasalahan ekonomi desa. Pembentukan BUMDesa harus diposisikan sebagai strategi yang jelas untuk pengelolaan aset kota.<sup>19</sup>

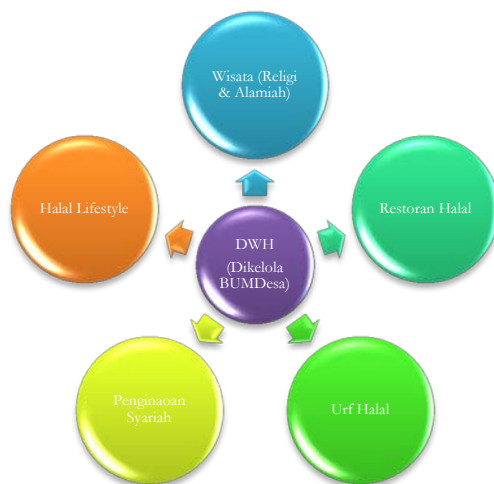
Terkait pengelolaan desa menuju desa wisata, persoalan sistem desa menjadi pedoman utama pengembangan desa wisata yang mendukung kearifan lokal. Idealnya, mengelola desa melalui kelembagaan yang mencerminkan prinsip good governance akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berdampak positif pada kemandiriannya. BUMDesa berperan penting

---

<sup>19</sup> Wafia Silvi Dhesinta Rini and Muhammad Insan Tarigan, "Pemanfaatan Wisata Mata Air Yang Dikelola Oleh Bumdesa Di Desa Belik," *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)* 1, no. 1 (March 27, 2020), <https://doi.org/10.22219/janayu.v1i1.11481>.

dalam mengelola desa wisata, seperti menjual paket liburan ke desa. kesejahteraan masyarakat. BUMDesa juga mengelola peran organisasi kepemudaan dan kelompok informasi wisata (Pokdarwis) yang melakukan kegiatan kepariwisataan di desa, memastikan pengelolaan melalui BUMDesa mempermudah pengelolaan desa wisata.

Berdasarkan beberapa penelitian dan kajian di atas, secara konseptual konsep Desa Wisata Halal dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Berdasarkan kerangka konseptual Desa Wisata Halal, sektor yang dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan Desa Wisata Halal adalah sebagai berikut.

1. Halal Lifestyle

Kebiasaan seseorang dalam mengkonsumsi barang/jasa yang berorientasi pada pemikiran halal disebut juga gaya hidup halal. Praktik gaya hidup halal dapat memastikan dan mengontrol moralitas semua yang dilakukan peserta. Pada saat yang sama, gaya hidup halal menjaga harkat, martabat, dan kehormatan manusia serta mempertahankan integritas dan individualitas manusia. Menjalani gaya hidup halal dalam kehidupan ini adalah hak setiap Muslim tetapi hak istimewa bagi setiap non-Muslim. Halal itu baik untuk Anda dan orang lain, jadi mari kita mulai gaya hidup halal sejak dini (*shalibun linafsiy wa ligairikehi*).<sup>20</sup>

2. Peningkatan yang Berbasis Syariah

---

<sup>20</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, "HALAL LIFESTYLE DI INDONESIA" 05, no. 2 (2019).

Populasi Muslim yang berkembang pesat di seluruh dunia menciptakan peluang untuk pangsa pasar hotel Syariah yang signifikan. Kemudian konsep syariah yang diberikan oleh Hotel Syariah merupakan bagian dari universalisme moral yang menghargai nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, tentunya ada permasalahan yang harus dihadapi oleh para pengusaha hotel syariah. Memang ada umat Islam di dunia, namun paling sering orang yang berwisata bukan berasal dari negara mayoritas Muslim. Oleh karena itu, lebih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menginformasikan dan mempromosikan konsep Syariah di kalangan non-Muslim. Penyediaan produk yang merupakan bagian dari masa inap, seperti kegiatan wisata dan layanan tambahan, harus menjadi bagian dari promosi manajemen hotel syariah. Selain itu, agar hotel syariah mampu memberikan pelayanan prima dan menerapkan konsep syariah dengan baik, mereka harus melatih karyawan atau karyawannya dalam pengetahuan syariah dan kualitas layanan yang sesuai dengan syariah.<sup>21</sup>

3. Wisata (Religi dan Alami)

Wisata halal di Jawa Timur memiliki prospek ekonomi yang baik sebagai bagian dari industri pariwisata tanah air. Industri pariwisata dirancang tidak hanya membawa kerugian material dan moral bagi wisatawan itu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan pemerintah. Hakikat wisata halal menekankan pada prinsip syariah dalam pengelolaan dan pelayanan pariwisata yang berlandaskan agama dan sewajarnya menghormati serta ramah terhadap semua wisatawan dan lingkungan.<sup>22</sup>

4. Urf Halal

Kearifan lokal yang ada dalam suatu masyarakat merupakan adat/tradisi yang mengakar kuat dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari suatu masyarakat. Muslim dengan pandangan toleran terhadap ajaran yang *Rahmatan Lil 'Alamin* adalah pilihan. Tradisi akan selalu dijaga dan dilestarikan selama masih sesuai dan tidak bertentangan

---

<sup>21</sup> Firqah Annajiyah Mansyurah, "Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Masyarakat Kosmopolitan," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 9, no. 2 (February 13, 2019): 91, <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i2.2511>.

<sup>22</sup> Aan Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects," *SSRN Electronic Journal*, 2017, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2899864>.

dengan akidah. Urf bisa menjadi salah satu landasan untuk membuat undang-undang berdasarkan konvensi yang ada.<sup>23</sup>

#### 5. Restoran Halal

Kehadiran restoran halal ini tidak mempersoalkan fakta bahwa konsumen Muslim berkunjung ke restoran tersebut dan mereka berusaha mengamankan lokasi yang luas, sehingga meningkatkan daya tarik kunjungan masyarakat dan memungkinkan mereka bersaing dengan restoran sekitarnya. Memiliki fasilitas yang lengkap.<sup>24</sup>

Dari berbagai elemen diatas, jika semuanya berkolaborasi dengan BUMDesa maka akan memproduktifkan masyarakat serta akan menambah pemasukan bagi desa. Jika semuanya memang dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal oleh BUMDesa, maka berbagai konsep dari Desa Wisata Halal diatas akan memberdayakan masyarakat. Terlebih bagi suatu desa yang memang sudah maju secara perekonomian, dilengkapi dengan sarana dan prasana yang ada maka akan mempermudah dalam pengalokasiannya. BUMDesa harus menjangkau kesemua pihak agar tujuan dari Desa Wisata Halal baik secara Halal Lifestyle, Penginapan Syariah, Urf, Wusata dan Restoran Halal bisa terkordinir dalam naungan BUMDesa. Pada akhirnya masyarakat yang banyak dibatkan dalam kegiatan ini akan menyejahterakan masyarakat. Adapun bagi pihak BUMDesa hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan Desa Wisata Halal ini diantaranya:

- a. Membangun kapasitas SDM yang ada untuk lebih meningkatkan efektivitas BUMdes dalam mendukung pemerintah desa dan masyarakat serta pemerintah daerah, sehingga lebih menarik bagi wisatawan.
- b. Karena kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, pemerintah desa dan BUMDesa serta Pokdarwis mengadakan seminar sadar pariwisata dan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan perguruan tinggi.
- c. Percepatan rencana kerja BUMDes dan pemerintah, terutama untuk desa yang potensinya cukup tinggi.

---

<sup>23</sup> Agung Setiyawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (July 22, 2012): 203–22, <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.

<sup>24</sup> Hardianti Nur, "Strategi Pengelolaan Rumah Makan Halal Di Tengah Masyarakat Non Muslim Di Kabupaten Mamasa" (Makasar, UIN Alauddin Makasar, 2021).

Masyarakat pedesaan berperan penting dalam pembentukan desa wisata halal karena keunikan tradisi dan budaya yang berbasis pada sumber daya alam dan kearifan lokal, dan tidak dapat dipungkiri bahwa inilah yang menjadi pendorong utama kegiatan desa wisata halal. Ini memiliki karakteristik Islami. Proses pemberdayaan masyarakat secara teoritis dapat dilakukan melalui proses emansipasi: dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan dengan dukungan pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, jika masyarakat diberdayakan untuk mengelola kegiatan program tertentu, masyarakat pedesaan dapat mengatasi tantangan yang biasa mereka hadapi. Seperti program kegiatan Desa Wisata Halal berbasis kearifan lokal. Masyarakat pedesaan saat ini bersiap dengan sumber daya yang tersedia. Ada beberapa alasan mengapa mereka bersedia mengikuti program Desa Wisata Halal. Diantaranya adalah banyaknya desa wisata yang dijalankan oleh pemerintah desa dan trend (kenaikan) wisata halal/pariwisata syariah yang berkembang saat ini.<sup>25</sup>

### **Analisis SWOT Proyeksi Perkembangan Wisata Halal Jawa Timur**

Matriks ini dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi pengembangan wisata halal di Jawa Timur dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahannya. Matriks ini dapat menghasilkan empat opsi kebijakan yang memungkinkan untuk penilaian internal dan eksternal terhadap kondisi lingkungan di Jawa Timur:

---

<sup>25</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, and Ana Kadarningsih, "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia" 5, no. 1 (2018).

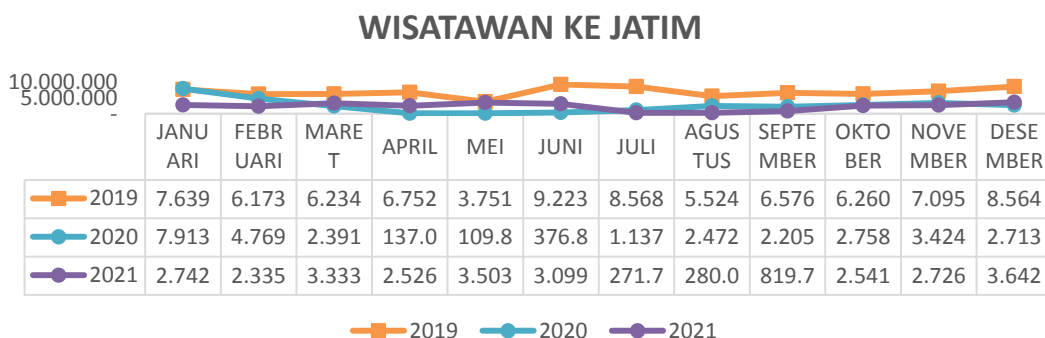


a. *Strengb* (Kekuatan)

Popularitas wisata Jawa Timur meluas hingga 29 kabupaten dan 9 perkotaan. Setiap destinasi wisata di Jawa Timur menawarkan tempat wisata yang unik, menarik dan sarat akan budaya khas Jawa Timur. Destinasi wisata Jawa Timur relatif lengkap, meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata belanja, wisata olah raga, dan wisata buatan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai destinasi wisata di negara bagian Jawa Timur. Selain itu, dukungan mobilitas infrastruktur juga menjadi keunggulan wisata halal di Jawa Timur. Infrastruktur penunjang mobilitas pariwisata di Jawa Timur cukup lengkap, mulai dari pilihan transportasi darat, laut, dan udara. Seluruh wilayah dan kota di Jawa Timur terhubung dengan infrastruktur transportasi darat melalui jalan raya dan rel kereta api. Moda transportasi lain yang tersedia bagi wisatawan adalah udara dan laut.

Puluhan juta wisatawan domestik mengunjungi Jawa Timur setiap tahun, menurut BPS. Dengan demikian, penopangnya adalah tingginya tingkat kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Jawa Timur.





Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (2022)

**Gambar:** Grafik Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Jawa Timur Melalui Pintu Masuk Juanda Tahun 2019-2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa pergerakan wisatawan bulan Maret hingga Juni 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 pada periode yang sama. Pasalnya, perintah *lockdown* telah dikeluarkan di banyak daerah seiring dengan meningkatnya jumlah kasus terkonfirmasi Corona 19 pada April 2020. Di sisi lain, jumlah kunjungan wisatawan pada 2021 akan menurun karena pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali pada 2021 dan lanjutan PPKM Darurat Fase 1-4 mulai Juli 2021. Jumlah perjalanan wisata ke Jawa Timur pada tahun 2021 sebanyak 27.822.475 kunjungan. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi unggulan yang memiliki potensi besar untuk pengembangan wisata halal pedesaan di Indonesia.

b. *Weakness* (Kelemahan)

Pengembangan wisata halal di Jawa Timur masih menghadapi kendala publisitas. Minimnya publisitas dari para pekerja di industri pariwisata menyebabkan stagnasi wisata halal di Indonesia dan tertinggal dari negara muslim lainnya. Kelemahan lain yang menghambat pengembangan wisata halal di Jawa Timur adalah peran industri jasa pariwisata lokal. Masalah lainnya, penelitian andriani menjelaskan, belum banyak *tour operator* yang mengemas wisata halal untuk perjalanan masuk dari Indonesia dan lebih banyak lagi untuk perjalanan keluar seperti umrah dan haji. Sebagian besar bisnis wisata dan perjalanan di Jawa Timur hanya menawarkan paket wisata tanpa memperhatikan aspek halal dari perjalanan

tersebut, seperti memilih hotel yang tidak bersertifikat syariah bagi wisatawan muslim.

Selain minimnya iklan dan branding desa wisata halal di Jawa Timur, minimnya dana untuk mendukung wisata halal juga sangat penting. Metode pendukung seperti hotel syariah menjadi yang terpenting dalam pengembangan wisata halal di Jawa Timur. Jumlah hotel syariah bersertifikasi MUI di tingkat nasional sebanyak 37 hotel dari 9.812 hotel di Indonesia. Minimnya jumlah hotel syariah bersertifikat di Jawa Timur disebabkan mahalnya biaya investasi hotel syariah akibat penambahan beberapa fasilitas dengan aspek berbeda setelah diresmikan Kemenpar dan MUI.<sup>26</sup> Kelemahan lainnya adalah masih relatif sedikitnya spesialis di bidang wisata halal. Sisi positif lain dari pengembangan wisata halal di Jawa Timur adalah tersedianya sumber daya manusia yang ahli di bidang wisata halal. Hingga saat ini, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta di Jawa Timur yang menawarkan program studi atau program pariwisata belum terlibat dalam wisata halal.

c. *Oppurtunity* (Kesempatan)

Adanya dukungan kebijakan pemerintah dan daerah semakin memberikan peluang yang besar guna mewujudkan desa wisata halal yang ada di Jawa Timur. Kementerian Pariwisata telah menetapkan 13 provinsi sebagai tujuan wisata halal terkemuka, termasuk provinsi Jawa Timur. Penentuan kawasan tersebut merupakan bagian dari target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pariwisata pariwisata global. Dukungan pemerintah dan adanya kebijakan daerah semakin memberikan peluang yang baik untuk mendirikan desa wisata halal di Jawa Timur. Kementerian Pariwisata telah menetapkan tiga belas provinsi sebagai destinasi wisata halal utama, termasuk provinsi Jawa Timur. Penetapan kawasan ini merupakan bagian dari cita-cita pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai hub pariwisata dunia.<sup>27</sup> Provinsi Jawa Timur mendukung penuh program tersebut dengan mengembangkan wisata halal di beberapa kota di daerah. Awal tahun 2017 menjadi motor penggerak Dinas

---

<sup>26</sup> Irwan Kelana. 2015. *Hotel Syariah Terkendala Investasi*, dilihat 13 Desember 2021, <http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/15/01/09/nhwmgm5-hotel-syariah-terkendala-investasi>

<sup>27</sup> Dini Andriani. 2015. *Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. Kementerian Pariwisata : Jakarta

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dalam pengembangan wisata halal.<sup>28</sup>

Selain Kota Malang, Pemkot Pasuruan juga mulai menggalakkan pengembangan wisata halal. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendasarkan pada keberadaan tempat wisata yang cukup lengkap seperti wisata alam pegunungan, air terjun, pemandian umum, danau, wisata keluarga, wisata religi-sejarah dan kuliner.<sup>29</sup> Badan Pembangunan Daerah Madura Surabaya (BPWS) juga berencana mengembangkan wisata halal di Pulau Madura. Menurut BPWS, wisata syariah menjadi fokus pengembangan wisata halal di Madura. Hal tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Madura yang beragama Islam yang 90% penduduknya beragama Islam. Potensi pengembangan wisata syariah di Madura juga terlihat pada adaptasi budaya lokal yang dipengaruhi oleh ajaran agama Islam dan adanya fasilitas wisata religi mulai dari masjid Madura hingga Istana Kerajaan.<sup>30</sup>

Peluang lain juga ditambahkan karena ada lembaga sertifikasi halal dan syariah yang mendukung pendirian wisata halal. Sertifikasi usaha pariwisata halal diatur melalui Peraturan Menteri Pariwisata No. 1 Tahun 2016 tentang Permohonan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Yayasan *Halalan Thoyyiban* Indonesia yang berlokasi di kota Batu juga menambah peluang tersendiri. Dana ini bertujuan untuk mewujudkan konsumen yang cerdas dan produsen yang bertanggung jawab berdasarkan Halal dan Taibe. Kegiatan berbasis Halalan Thoyyiban Indonesia meliputi penelitian komprehensif berdasarkan *Halal* dan *Tayyib*, pekerjaan umum, dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan.

Secara internasional, reputasi baik Indonesia untuk wisata halal juga menambah potensinya. Halal Tourism di Indonesia telah diakui oleh World Halal Tourism Awards dalam dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 dan

---

<sup>28</sup> Andi Artik. 2016. *Awal Tahun 2017, Kota Malang Targetkan Jadi Destinasi Wisata Halal*, dilihat 11 Desember 2021, <http://travel.kompas.com/read/2016/09/01/211500927/Awal.Tahun.2017.Kota.Malang.Targetkan.Jadi.Destinasi.Wisata.Halal>

<sup>29</sup> Andi. 2017. 2018, *Pasuruan Fokus Kembangkan Wisata Halal*, dilihat 14 Desember 2021, <http://travel.kompas.com/read/2016/04/11/172500627/2018.Pasuruan.Fokus.Kembangkan.Wisata.Halal>

<sup>30</sup> Citra Fitri Mardiana. 2017. *Pulau Madura Bakal Punya Wisata Berbasis Syariah*, dilihat 8 Desember 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3580526/pulau-madura-bakal-punya-wisata-berbasis-syariah>

2016. Penghargaan ini merupakan pengakuan internasional terhadap potensi dan daya tarik wisata halal di Indonesia. Indonesia menerima tiga penghargaan pada Penghargaan Pariwisata Halal Dunia 2015: Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia (Lombok), Destinasi Bulan Madu Halal Terbaik Dunia (Lombok), dan Hotel Ramah Keluarga Terbaik Dunia (hotel Sofia). Pada Penghargaan Pariwisata Halal Dunia 2016, Indonesia memenangkan 12 dari 16 kategori.<sup>31</sup>

d. *Threat* (Ancaman)

Fenomena radikalisme dan terorisme berkedok agama di Indonesia disajikan dalam artikel ini beserta data dan argumentasi yang benar. Ancaman disintegrasi bangsa dan konflik horizontal yang disertai kebencian dan kekerasan menjadi fenomena yang melekat dalam berbagai aktivitas kekuatan radikal tersebut. Hal ini terus mengubah wajah Islam Indonesia yang identik dengan toleransi, kedamaian dan keramahan, menjadi wajah Islam lain yang tangguh, tangguh dan bengis.<sup>32</sup> Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga stabilitas nasional di tingkat lokal, nasional, provinsi, internasional dan global di semua sektor yang ada. Terutama dalam kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari masyarakat. Hal ini juga akan mempengaruhi pelaksanaan desa wisata halal yang ada. Jika kondisi di atas benar-benar terjadi, maka stabilitas keamanan internal dan eksternal juga akan menjadi ancaman tersendiri. Oleh karena itu, kita harus siap menghadapi berbagai tantangan yang ada, mengingat persaingan antar daerah dan negara untuk pengembangan wisata halal akan terus terjadi setiap saat.

Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya menjaga stabilitas negara baik secara

Berdasarkan pemaparan diatas, tabel Analisis SWOT sebelumnya telah menjelaskan secara rinci dari masing-masing analisis yang dilakukan baik secara Internal ataupun Eksternal. Dibawah ini merupakan permusan strategi pengembangan pariwisata halal Jawa Timur dari EFAS dan IFAS:

EFAS\IFAS	Kebijakan
-----------	-----------

<sup>31</sup> National Geographic Indonesia. 2016. Indonesia Raih 12 Penghargaan Bergengsi di Ajang The World Halal Tourism Awards 2016, dilihat 5 Desember 2021, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/12/indonesia-raih-12-penghargaan-bergengsi-di-ajang-the-world-halal-tourism-awards-2016>

<sup>32</sup> Robingatun Robingatun, "Radikalisme Islam Dan Ancaman Kebangsaan," *EMPIRISMA* 26, no. 1 (July 15, 2017), <https://doi.org/10.30762/empirisma.v26i1.684>.

Strategi S-O	Mendorong investasi dalam pengembangan sarana pendukung pariwisata halal Jawa Timur, semakin banyaknya yang berinvestasi maka akan menambah keuangan yang bisa direalisasikan untuk pelengkapan sarana Desa Wisata Halal.
Strategi W-O	Pengembangan <i>Multi platform</i> Informasi Pariwisata Halal Jawa Timur berbasis <i>Internet of Things</i> (IoT) mengingat perkembangan zaman yang sudah serba canggih dan berbasis digital semua.
Strategi S-T	Membangun <i>branding</i> pariwisata halal Jawa Timur bertajuk “Khazanah Jawa Timur”
Strategi W-T	Penguatan kelembagaan melalui pembentukan Badan Otoritas Pengelola Pariwisata Halal Propinsi Jawa Timur yang didalamnya harus BUMDesa mengambil peran penting dalam tata kelola sehingga bisa terkordinir dengan baik.

Adapun, dengan adanya beberapa hasil analisis di atas, untuk bisa menjaga pariwisata syariah agar selalu dikenal dan dapat menjadi daya tarik tersendiri, maka dibutuhkan beberapa strategi yang jitu agar selalu dapat mengembangkan pariwisata syariah di Jawa Timur, bahkan se-Indonesia. Oleh karena itu, tawaran beberapa strategi yang dianggap penting untuk dapat menjaga eksistensi pariwisata syariah yaitu:

No	Strategi	Keterangan
1	Melahirkan Duta Pariwisata Syariah	Dengan adanya Duta pariwisata syariah sebagai media untuk memperkenalkan item wisata, maka diharapkan Pariwisata Syariah yang lahir dapat memperluas cakupannya, bahkan sudah memiliki item pariwisata syariah se-Provinsi.
2	Melaksanakan Sertifikasi Halal dan Thoyyiban	Diperlukan dukungan Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dapat menciptakan sertifikasi halal bagi item wisata syariah yang lahir.
3	Menciptakan Kreativitas untuk Produk Kuliner	Dengan adanya SDM yang berkompeten, produk kuliner yang sudah ada pun dapat dikreasikan tanpa harus menghilangkan ke-khas-an dan nilai dari suatu produk

		tersebut.
4	Membuat Percontohan” “Daerah Pariwisata Syariah	Strategi ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan penting sebagai wadah awal untuk mewujudkan dan mengembangkan pariwisata syariah.
5	Memanfaatkan semua Media yang ada.	Media sosial, media elektronik, maupun media massa diharapkan dapat mendukung sosialisasi pariwisata syariah yang merupakan salah satu item dari Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
6	Membuat “Manual Tour Guide” khusus pariwisata syariah	Dengan adanya panduan manual ini, diharapkan dapat memperkenalkan hal-hal yang bersifat syar’i ketika sedang melakukan wisata syariah.
7	Men-Syiar-Kan Dampak Negatif “Item Pariwisata” Yang Tidak Syar’i	Dengan mengetahui dampak negatif dari item pariwisata yang tidak syar’i, diharapkan dapat memberikan edukasi wisatawan terkait pariwisata syariah dan non-syariah.
8	Membuat Jurusan Pariwisata Syariah	Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan SDM yang handal dalam mengelolah pariwisata syariah.
9	Mengoptimalkan keberadaan BUMDesa.	Melakukan inovasi dalam menggagas Desa Wisata Halal yang dikelola

### Dampak Desa Wisata Halal Berbasis BUMDesa di Jawa Timur

#### 1. Dampak terhadap pendapatan masyarakat lokal

Peningkatan pendapatan terjadi pada berbagai bidang mata pencaharian masyarakat seperti pedagang, pekerja jasa pariwisata dan sebagainya. Pengembangan pariwisata banyak membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mendapat penghasilan tambahan selain dari sektor unggulan wilayah sekitar. Sedangkan dampak tidak langsung adalah semakin meningkatnya

nilai jual tanah yang berarti juga sebuah investasi masyarakat. Industri pariwisata memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang sehingga pendapatan masyarakat menjadi naik menjadikan daya beli masyarakat naik sehingga kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya semakin tinggi, bahkan orientasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bukan lagi kebutuhan primer ataupun sekunder, tetapi juga tersier.

2. Dampak terhadap kesempatan kerja dan berusaha

Pengembangan desa wisata halal juga diharapkan berkontribusi positif terhadap peningkatan kesempatan kerja serta mengurangi pengangguran di masyarakat Desa terkait. Adanya pembangunan pariwisata halal di desa membuka banyak kesempatan bekerja, hal tersebut dikarenakan industri pariwisata yang sangat kompleks menimbulkan kesempatan untuk membuat suatu usaha demi memenuhi kebutuhan pariwisata menjadi besar. Terbukanya lapangan kerja baru secara otomatis akan mengurangi pengangguran, pariwisata yang membuka banyak lapangan kerja di desa terkait ini membuat tingkat pengangguran menurun secara signifikan.

3. Dampak Pembangunan Desa Wisata Halal terhadap Sosial Budaya Masyarakat Desa

Salah satu dampak adanya desa wisata adalah pendapatan perkapita yang meningkat mengakibatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Sehingga masyarakat mempunyai kesadaran untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Seiring dengan adanya pariwisata kesenian dan adat istiadat di suatu desa juga akan semakin dilestarikan, sering digelar sehingga masyarakat dari generasi ke generasi tetap mengetahui dan mempelajari seni budaya dan adat istiadat yang mereka miliki, akan membuat masyarakat menyadari bahwa kesenian dan upacara adat dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata yang artinya dapat menarik wisatawan untuk berkunjung selanjutnya. Terlebih lagi dengan konsep yang berbasis syariah, maka sosial budaya yang terbentuk juga tidak akan jauh dari koridor syariah. Diharapkan nantinya diadakan kegiatan islami baik pengajian, atau berbasis keilmuan islam seperti pelatihan ketrampilan, pelatihan manajemen, pelatihan bahasa inggris dan arab, adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan membuat ketrampilan masyarakat dalam bidang-bidang tersebut semakin bertambah.

4. Dampak pembangunan pada umumnya

Sejalan dengan pengembangan pariwisata, pengembangan terhadap infrastruktur desa juga mulai dikerjakan seperti pembangunan konblok pada gang-gang didesa, pembangunan balai pertemuan, neonisasi, sarana MCK, dan lain sebagainya. Beberapa pihak yang melihat progres perkembangan desa wisata yang positif tertarik untuk memberikan bantuan, misalnya Bank Mandiri yang memberikan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) bagi pengembangan prasarana di yang terdapat di desa-desa. Dengan melibatkan masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan dalam setiap aspek pengelolaan Desa, manfaat ekonomi pariwisata berupa tambahan pendapatan, peluang kerja dan usaha baru dapat terdistribusi secara merata kepada setiap lapisan masyarakat. Dengan begitu masyarakat mendukung penuh pengembangan Desa Wisata Halal karena model pengelolaan berbasis masyarakat tersebut membawa dampak ekonomi yang positif dan dapat dirasakan masyarakat.<sup>33</sup>

## **Kesimpulan**

Pengembangan pariwisata halal di Jawa Timur merupakan salah satu strategi dalam menjadikan sektor pariwisata sebagai mesin ekonomi Jawa Timur. Pengembangan wisata halal di Jawa Timur didukung oleh potensi seperti kearifan lokal yang berkembang dan dipengaruhi oleh Islam, keberadaan objek wisata religi, alam dan buatan serta aksesibilitas dan fasilitas pendukung lainnya. Berdasarkan hasil analisis diagram SWOT pariwisata halal di Jawa Timur, yang berarti memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan pariwisata halal di Jawa Timur memerlukan beberapa strategi, termasuk: 1) mendorong investasi domestik dan asing dalam pengembangan pariwisata halal di Jawa Timur; 2) mengembangkan multi-platform pusat informasi halal pariwisata Jawa Timur berdasarkan IoT; 3) desain branding berjudul "Khazanah Jawa Timur" yang digabungkan dengan implementasi acara Islam kelas dunia yang menampilkan budaya Islam nusantara; 4) pembentukan otoritas pengelolaan pariwisata halal pariwisata Jawa Timur. Melalui BUMDesa serta Pemerintah desa setempat dapat memulai tahap awal dengan merancang strategi pengembangan desa wisata halal yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat terutama perekonomian masyarakat karena pariwisata merupakan sektor yang multiefek. Sebagai selaku pengelola

---

<sup>33</sup> Nunun Nurhajati, "Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," n.d.



wisata harus lebih fokus dan ofensif dalam menjalankan program kerja yang dijalankan serta memilih potensi apa saja yang menjadi prioritas dalam mengembangkan potensi desa wisata yang ada.

Dengan adanya desa wisata ini akan memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat lokal, dampak terhadap kesempatan kerja dan berusaha, dampak Pembangunan Desa Wisata Halal terhadap Sosial Budaya Masyarakat Desa dan dampak pada pembangunan pada umumnya. Melalui beberapa pengembangan strategi diatas diharapkan dapat mengoptimalkan potensi wisata halal Jawa Timur untuk menjadi salah satu tujuan wisata halal terkemuka di Indonesia yang dapat bersaing dengan negara-negara di dunia. Selain itu, keberadaan halal pariwisata Jawa Timur akan mendukung percepatan Indonesia sebagai pusat pariwisata halal dunia dengan berbagai keuntungan yang akan kita peroleh.

## **Daftar Pustaka**

- Adinugraha, Hendri Hermawan. "DESA WISATA HALAL: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA." *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, no. 0 (June 29, 2018). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/1336>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Razie Bin Nasarruddin, Ahmad Rofiq, Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, Ade Yusuf Mujaddid, and Mila Sartika. "Community-Based Halal Tourism Village: Insight from Setanggor Village." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (July 1, 2020): 129–54. <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.1.6819>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, and Ana Kadarningsih. "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia" 5, no. 1 (2018).
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. "HALAL LIFESTYLE DI INDONESIA" 05, no. 2 (2019).
- Aeni, Ida Nur, Amir Mahmud, Nurdian Susilowati, and Andhika Bella Prawitasari. "Sinergitas BUMDesa Dalam Manajemen Pengelolaan Desa Wisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan." *Jurnal Abdimas* 25, no. 2 (December 7, 2021): 169–74. <https://doi.org/10.15294/abdimas.v25i2.33355>.

- Aminudin, Norliza, and Salamiah A. Jamal. "Types of Tourism: The Travelogue of the Greatest Traveller." *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 2 (January 1, 2019): 497–506. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0089>.
- Andi Artik. 2016. *Awal Tahun 2017, Kota Malang Targetkan Jadi Destinasi Wisata Halal*, dilihat 11 Desember 2022, <http://travel.kompas.com/read/2016/09/01/211500927/Awal.Tahun.2017.Kota.Malang.Targetkan.Jadi.Destinasi.Wisata.Halal>
- Andi. 2017. *2018, Pasuruan Fokus Kembangkan Wisata Halal*, dilihat 14 Desember 2022, <http://travel.kompas.com/read/2016/04/11/172500627/2018.Pasuruan.Fokus.Kembangkan.Wisata.Halal>
- Anwar, Arief Budi Witarto, and Mega Trishuta Pathiassana. "ANALISIS PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL DI DESA TETE BATU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT | Jurnal TAMBORA" 04, no. 02 (October 26, 2020). <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/Tambora/article/view/764>.
- Ardiansyah, F., Firdaus, N. Y., & Muhtadi, R. (2021). Optimalisasi BUMDES Berbasis OVOP (One Village One Product) Concept Di Kabupaten Pamekasan. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 1(2), 153-164.
- Battour, Mohamed. "Halal Tourism or Muslim-Friendly Tourism?," September 2016. <https://www.crescentrating.com/magazine/opinion/3925/halal-tourism-or-muslim-friendly-tourism.html>.
- Battour, Mohamed, Moustafa Battor, and Muhammad Awais Bhatti. "Islamic Attributes of Destination: Construct Development and Measurement Validation, and Their Impact on Tourist Satisfaction: Islamic Tourism." *International Journal of Tourism Research* 16, no. 6 (November 2014): 556–64. <https://doi.org/10.1002/jtr.1947>.
- Battour, Mohamed M., Mohd Nazari Ismail, and Moustafa Battor. "Toward a Halal Tourism Market." *Tourism Analysis* 15, no. 4 (December 1, 2010): 461–70. <https://doi.org/10.3727/108354210X12864727453304>.
- Budhi Pamungkas Gautama, Ayu Krishna Yuliawati, Netti Siska Nurhayati, Endah Fitriyani, and Ilma Indriasri Pratiwi. "PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1,

no. 4 (October 1, 2020): 355–69.  
<https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>.

Camilleri, Mark Anthony. *Travel Marketing, Tourism Economics and the Airline Product: An Introduction to Theory and Practice*. Tourism, Hospitality & Event Management. Cham: Springer, 2018.  
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-49849-2>.

Citra Fitri Mardiana. 2017. *Pulau Madura Bakal Punya Wisata Berbasis Syariah*, dilihat 8 Desember 2022, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3580526/pulau-madura-bakal-punya-wisata-berbasis-syariah>

Darussalam, Andi Zulfikar, Syarifuddin Syarifuddin, Ega Rusanti, and A. Darussalam Tajang. “Pengembangan Manajemen Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Sipakatau’, Sipakainge’, Sipakalebbi’.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 2, 2021): 96–105.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1831>.

Dhesinta Rini, Wafia Silvi, and Muhammad Insan Tarigan. “PEMANFAATAN WISATA MATA AIR YANG DIKELOLA OLEH BUMDESA DI DESA BELIK.” *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)* 1, no. 1 (March 27, 2020).  
<https://doi.org/10.22219/janayu.v1i1.11481>.

Dini Andriani. 2015. *Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. Kementerian Pariwisata : Jakarta

Handriana, Tanti, Praptini Yulianti, and Masmira Kurniawati. “Exploration of Pilgrimage Tourism in Indonesia.” *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 3 (May 20, 2020): 783–95. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0188>.

Hardianti Nur. “STRATEGI PENGELOLAAN RUMAH MAKAN HALAL DI TENGAH MASYARAKAT NON MUSLIM DI KABUPATEN MAMASA.” UIN Alauddin Makasar, 2021.

Hasan, Fahadil Amin Al. “PENYELENGGARAAN PARAWISATA HALAL DI INDONESIA (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) | Al Hasan | Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum,” June 30, 2017. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i1.699>.

Hastutik, Dwi, Dwiningtyas Padmaningrum, and Agung Wibowo. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.”

- AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension* 45, no. 1 (May 1, 2021): 46–38. <https://doi.org/10.20961/agritexts.v45i1.51539>.
- Isdarmanto. *Dasar-Dasar Kepariwisata Dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan STiPrAm Yogyakarta, 2016.
- Irwan Kelana. 2015. *Hotel Syariah Terkendala Investasi*, dilihat 13 Desember 2022, <http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/15/01/09/nhwmgm5-hotel-syariah-terkendala-investasi>
- Jaelani, Aan. “Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects.” *SSRN Electronic Journal*, 2017. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2899864>.
- . “Islamic Tourism Development in Cirebon: The Study Heritage Tourism in Islamic Economic Perspective.” *Journal of Economics Bibliography* 3, no. 2 (June 18, 2016): 215–35. <https://doi.org/10.1453/jeb.v3i2.688>.
- Korstanje, Maximilliano E., Razaq Raj, and Kevin Griffin, eds. *Risk and Safety Challenges for Religious Tourism and Events*. CABI Religious Tourism and Pilgrimage Series. Wallingford, Oxfordshire Boston, MA: CABI, 2018.
- Leppäkari, Maria, and Kevin A. Griffin, eds. *Pilgrimage and Tourism to Holy Cities: Ideological and Management Perspectives*. CABI Religious Tourism and Pilgrimage Series. Oxfordshire, OX Boston, MA: CABI, 2017.
- Lubis, M. Zaky Mubarak. “PROSPEK DESTINASI WISATA HALAL BERBASIS OVOP (ONE VILLAGE ONE PRODUCT).” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 3, no. 1 (June 1, 2018): 31–47. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v3i1.153>.
- Mansur, M., Muhtadi, R., Kamali, K., & Rofiki, A. (2020). Model Local Culture Tourism Berbasis Tanean Lanjhang Desa Larangan Luar Pamekasan. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 17-40.
- Mansyurah, Firqah Annajiyah. “PELUANG DAN TANTANGAN BISNIS HOTEL SYARIAH PADA MASYARAKAT KOSMOPOLITAN.” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 9, no. 2 (February 13, 2019): 91. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i2.2511>.
- Ma’ruf, Muhammad Farid, Badrudin Kurniawan, and Rizky Purna Aji Galih Pangestu. “Desa Wisata: Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul).”

*Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 2 (October 7, 2017). <https://doi.org/10.33005/jdg.v7i2.1209>.

- Muhtadi, R. (2012). Sinergisme Baitul Maal wa tamwil (BMT) dengan badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai alternatif penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan di Madura. *Jurnal Sains Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Airlangga*.
- Mutmainah, Dini Nafisatul, Muksin Muksin, and Sri Sundari. "Analysis of the Sustainability of the Economic Dimension to the Development of Halal Tourism in Banyuwangi Regency." *Journal of Agri Socio Economics and Business* 2, no. 1 (June 24, 2020): 15–22. <https://doi.org/10.31186/jaseb.2.1.15-22>.
- National Geographic Indonesia. 2016. Indonesia Raih 12 Penghargaan Bergengsi di Ajang The World Halal Tourism Awards 2016, dilihat 5 Desember 2022, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/12/indonesia-raih-12-penghargaan-bergengsi-di-ajang-the-world-halal-tourism-awards-2016>
- Nurhajati, Nunun. "DAMPAK PENGEMBANGAN DESA WISATA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT," n.d.
- Nuringsih, Nuringsih, Lismawati Lismawati, Andi Nuddin, and Trimulato Trimulato. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekonomi Rumah Tangga di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 2 (October 22, 2019): 223–39. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5721>.
- Nurohman, Yulfan Arif, and Rina Sari Qurniawati. "STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA MENGGORO SEBAGAI WISATA HALAL." *Among Makarti* 14, no. 1 (July 13, 2021). <https://doi.org/10.52353/ama.v14i1.200>.
- Rasyifa, Hafielda, Diah Zulianingrum, Deni Lubis, and Marhamah Muthohharoh. "Strategic Development of Halal Tourism Village Kampung Batik Cibuluh Bogor (KBCB) as A Socio-Cultural Destination in Indonesia." *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer* 22, no. 2 (November 14, 2021): 1–15. <https://doi.org/10.37231/jimk.2021.22.2.572>.

- Robingaton, Robingaton. "RADIKALISME ISLAM DAN ANCAMAN KEBANGSAAN." *EMPIRISMA* 26, no. 1 (July 15, 2017). <https://doi.org/10.30762/empirisma.v26i1.684>.
- Rosyidah, F., Ardiansyah, F., & Muhtadi, R. (2021). BUMDesMa KAMPUNG TANI: PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS AKAD SYARIAH DI KABUPATEN PAMEKASAN. *IQTISADIE*, 1(2), 193-224.
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (July 22, 2012): 203–22. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.
- Surur, Fadhil. *Wisata Halal; Konsep dan Aplikasi*. Makassar, Indonesia: Alauddin University Press, 2020.
- Umiyati, Sri, and Husni Tamrin. *PENGEMBANGAN WISATA HALAL, TANGGUNG JAWAB SLAPA? Studi Kasus Kolaborasi Stakeholder Halal Tourism di Kota Malang*. Jakarta: PT. AKSES PRIMA CENDEKIA, 2020.
- Wijdan, Achmad Qori'. "Model Pengembangan Desa Wisata Halal di Kabupaten Sumenep ditinjau Dari Peraturan Bupati NO. 15 TAHUN 2018 (Studi di Desa Semaan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Madura)." *SHIBGLAH: Journal of Muslim Societies* 3, no. 2 (December 21, 2021): 139–47.
- Yanma, Tareq Azis, and Muchammad Zaenuri. "Analisis Potensi Desa Wisata Pulesari Menuju Desa Wisata Halal Tahun 2020." *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, January 19, 2021, 602–20. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2021.v07.i02.p12>.
- Zaenuri, Muchamad. *PERENCANAAN STRATEGIS KEPARIWISATAAN DAERAH Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: e-Gov Publishing, 2012.